



Seni Mimikri dalam Tragedi Politik 1965

Anicetus Windarto^{1*}

Peneliti di Lembaga Studi Realino Universitas Sanata Dharma¹

winddarto@yahoo.com

*

Abstract : *This paper intends to review the 1965 political tragedy through an interdisciplinary and cultural approach. The entrance was through music, especially a song entitled "Let's Be Happy" which became popular in the 1965s. With that song, it was discovered that a political tragedy that cost lives and created lasting trauma is like a film. That means, all forms of violence in this political tragedy are an imitation (mimicry) whose vile and cruel nature is only limited to an entertaining spectacle.*

Keywords: *Art, Mimicry, Political Tragedy, 1965.*

Abstrak: Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji ulang mengenai tragedi politik 1965 melalui pendekatan lintas ilmu dan budaya. Pintu masuknya adalah melalui musik, khususnya lagu berjudul "Mari Bersukaria" yang pernah menjadi populer pada tahun 1965-an. Dengan lagu itu, ditemukan bahwa tragedi politik yang mengorbankan nyawa dan menciptakan trauma berkepanjangan itu bagaikan sebuah film. Itu artinya, segala bentuk kekerasan dalam tragedi politik itu adalah sebuah tiruan (mimikri) yang sifat keji dan kejamnya hanya sebatas tontonan yang mengibur semata.

Kata Kunci: Seni, Mimikri, Tragedi Politik, 1965

Article
History:

Received: Juni-2023

Revised: 09-Juni-2023

Accepted: 18-Juli-
2023

1. Pendahuluan

Menarik untuk mengenang tragedi Gerakan 30 September 1965 tidak selalu harus dalam konteks perang, darah dan air mata, tetapi juga musik. Lewat lagu dengan judul "Mari Bersukaria" yang sempat didendangkan Bung Karno pada 29 September 1965

dalam Kongres Gerakan Mahasiswa Indonesia di Jakarta, peristiwa bersejarah itu dapat dipelajari dan dimaknai dengan lebih inspiratif dan kreatif. Sebab ada temuan penting terkait dengan apa yang telah dipaparkan di sana. Temuan yang oleh Joshua Oppenheimer mampu direkam dengan jeli dan cermat dalam film berjudul “Jagal” atau “*The Act of Killing*” (2012).

Film yang mengisahkan pengakuan dari para jagal ‘65, khususnya di Sumatera Utara, memperlihatkan bagaimana pembunuhan massal itu dikerjakan. Salah satunya, berdasar pengakuan dari Anwar Congo, adalah dengan menjerat leher para korban hanya dengan menggunakan seutas kawat. Namun, yang agak khas, sebelum hal itu dilakukan biasanya didahului dengan menyanyi dan menari cha-cha sembari mengkonsumsi minuman beralkohol atau mariyuana.

Inilah ritual jagal ‘65 yang justru dianggap “efisien, kurang sadis, dan tidak menggunakan kekerasan yang berlebihan” (<https://historia.id/politik/articles/congo-vx98P>). Dengan ritual itu, para korban dibayangkan tidak akan mengalami rasa takut yang sedemikian mencekam, bahkan justru berterimakasih karena telah dibantu untuk dikirim ke Surga. Maka, ritual yang diiringi dengan lagu dan tari ala film-film Hollywood di tahun 1960-an sesungguhnya adalah cermin dari fantasi industrial. Fantasi yang hadir melalui akses dari para bintang film Amerika dan memerankan sebagai “tokoh-tokoh yang tidak bisa mati” (*the figures of immortality*).

Bagi Anwar Congo, termasuk Adi Zulkadry, tokoh-tokoh seperti Lone Ranger, Batman, Patten, Shane, Samson, MacArthur, atau Rambo, adalah tontonan dan sekaligus tuntunan yang memberi sebuah hiburan. Melalui bioskop-bioskop yang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, para jagal itu seperti mendapatkan saat dan tempat yang tepat untuk tampil sebagai pahlawan yang sesungguhnya. Sebab, hanya dengan demikian, legitimasi untuk melakukan pembunuhan terhadap siapapun yang dianggap komunis dihalalkan. Meski, pada kenyataannya, apa yang dilakukan sesungguhnya adalah ilegal, bahkan termasuk dalam kejahatan kemanusiaan.

Persis seperti “Petrus” atau “Penembakan Misterius” yang terjadi di tahun 1980-an, pembunuhan ‘65 tampak kebal dari hukum apapun, baik nasional maupun internasional. Padahal cukup jelas bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan sadar dan tanpa rasa bersalah sedikitpun hingga kini. Apalagi pembunuhan itu dikerjakan dengan alunan musik, termasuk tarian, yang mampu menghasilkan rasa kebal atau tak

bersalah terhadap siapapun. Bahkan musik itu seolah-olah semakin menambah daya dan kuasa untuk melakukan pembunuhan secara meyakinkan.

Dalam batas-batas tertentu, musik memang dapat melahirkan keyakinan yang lebih sukar digoyang dengan pengetahuan. Keyakinan yang mampu menampilkan kekebalan itu juga tampak dalam jejak langkah kebudayaan masyarakat lokal seperti pada kesenian jathilan (Jawa Tengah) atau debus (Bali). Meski tidak dapat dijelaskan secara rasional, namun kekebalan itu tampak nyata. Artinya, hal itu dapat disaksikan secara kasat mata, bahkan dipraktikkan oleh siapapun yang menginginkannya.

Namun, dalam ritual jagal '65, khususnya sebagaimana ditunjukkan oleh Congo dan para pengikutnya di atas, hal itu justru menjadi peristiwa yang teramat tragis, bahkan traumatis. Masuk akal jika Congo pun sempat mengakui dihantui oleh sejumlah orang yang telah dijagalnya dalam beberapa mimpinya. Mimpi yang dalam kajian psikoanalisis adalah kreasi dari dunia bawah sadar semakin menjelaskan bahwa jagal '65 bukan merupakan kekejaman yang dapat dibawa ke meja hukum. Maka, tak heran jika hingga saat ini tidak ada satupun pengadilan terhadap para jagal '65, meski sudah ada banyak kesaksian yang mengungkap bagaimana dan mengapa jagal '65 terjadi.

Tentu, hal ini bukan semata-mata dikerjakan atas nama penegakan hukum dan keadilan. Namun, terutama ada semacam rekonsiliasi yang dapat ditempuh agar peristiwa kelam itu dalam sejarah tidak terulang kembali. Selain itu, generasi selanjutnya, khususnya yang tidak mengalami atau terlibat secara langsung, dapat belajar dengan baik dari setiap pelajaran sejarah sekelam apapun. Bahkan jika mungkin, generasi milenial saat ini tergerak untuk membuat beragam penelitian atau riset ilmiah, terutama berkait dengan musik yang ternyata berperan penting dan signifikan dalam berbagai peristiwa bersejarah.

2. Hasil dan Pembahasan

Terbukti dalam peristiwa jagal '65, musik dapat menjadi semacam energi yang membuat siapapun menjadi tidak takut untuk melakukan apapun, termasuk pembunuhan secara keji dan kejam sekalipun. Dalam konteks ini, menarik untuk mengaitkan hal itu dengan nasionalisme yang selalu menjadi "bahan bakar" dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme misalnya. Meski belum pernah berjumpa, bahkan bertegur sapa, siapapun rela mengorbankan nyawa sesamanya, termasuk nyawanya sendiri, demi pembayangan yang serba terbatas bernama nasionalisme.

Menarik bahwa di tengah pandemi Covid-19 ada momen sejarah yang nyaris dilupakan berkait dengan kelahiran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 23 Mei 1920. Itu artinya, tepat seabad silam organisasi politik yang pernah menjadi lima besar dalam perolehan suara pada Pemilu 1955 itu hanya diingat sebatas kekejaman dan/atau pengkhianatan dalam peristiwa “G-30-S” belaka. Akibatnya, peristiwa politik seperti pada tahun 1965-1966, yang sesungguhnya merupakan sejarah penting hanya dipandang sebagai sebuah tragedi semata. Padahal, ada momentum historis yang tak kalah penting daripada sekadar isu komunis dan kerap diabaikan sehingga dilupakan, bahkan dimitoskan sebagai politik suksesi penguasa.

Dalam kisah pewayangan, politik suksesi yang kerap dibahasakan dengan “lengser keparabon, madeg pandito” itu sesungguhnya tidak selalu berakhir dengan sukses. Di tahun 1965 saja, meski Presiden Sukarno berhasil dilengserkan, namun ada banyak nyawa yang hilang akibat “kudeta” yang dijalankan pada 1 Oktober dini hari. Itulah mengapa wartawan Brian May menulis dengan amat tragis tentang Indonesia, seperti dikutip Saya Shiraishi (2001), bahwa: “Indonesia dilahirkan setelah sebuah penculikan; dilahirkan kembali dalam kudeta dan dibaptis dengan darah pembantaian.”

Gambaran politik suksesi penguasa di tahun 1965 memang masih samar-samar. Bahkan lebih terkesan sebagai sebuah pemberontakan ketimbang upaya pergantian kekuasaan. Maka bukan kebetulan jika Angkatan Bersenjata, terutama Angkatan Darat, tampak sangat berperan di sana. Sebab dalam setiap perubahan politik yang berpotensi mengundang kekacauan, khususnya gelombang banjir darah, tugas untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara berada di tangan militer. Pandangan seperti itu tampak mewakili sejenis historiografi kerakyatan yang menjelaskan dan meneguhkan bahwa konsep politik sukses(i) penguasa tergantung pada campur tangan pihak-pihak yang memegang senjata.

Di saat-saat bersejarah yang menentukan pada tahun 1965 tampak bagaimana kudeta 1 Oktober menjadi pemicu yang efektif dan operatif untuk mengerjakan politik sukses(i) penguasa. Dalam dokumen yang bersifat “rahasia” dan kemudian dikenal dengan “Cornell Paper” (“A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia”, 1971), ditunjukkan betapa konflik internal di tubuh Angkatan Darat merupakan latar dari panggung politik sukses(i) termaksud. Dalam kumpulan dokumen lain yang terkait dengan Gerakan 30 September (G-30-S), majalah *Indonesia*

terbitan Cornell University mengungkap bahwa kudeta tersebut ditujukan bagi “jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kekuasaan yang telah menelantarkan anak buah.” Ungkapan itu didasarkan pada pernyataan awal dari Letnan Kolonel Untung sebagai pemimpin kelompok kudeta yang disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) pada 1 Oktober pagi hari. Jadi cukup jelas jika kudeta itu mirip dengan kemarahan “anak buah” kepada “atasan” atau “bapak” mereka.

Kemarahan yang identik atau isomorfis dengan “ancaman” sekelompok pemuda di tahun 1945 ketika menculik Sukarno dan Hatta dan membawanya ke Rengasdengklok itu sesungguhnya hanyalah “gertak sambal” belaka. Maka, tak heran apabila Sukarno tidak pernah menyalahkan, apalagi menghukum, para anak buah, baik yang menculiknya maupun yang membawa para jenderal ke suatu tempat (Lubang Buaya). Dalam bahasa Sukarno tatkala dilapori kudeta yang gagal itu, adalah “yang semacam ini biasa dalam revolusi”. Itulah panggung tradisi revolusioner gaya Indonesia yang justru ditutup layarnya dengan sebuah politik suksesi penguasa ala Orde Baru yang didahului oleh suatu pembunuhan massal.

Hal itulah yang telah melahirkan para bapak penguasa yang “reaksioner” dan “tahu segala”. Para bapak yang selalu melarang anak, apalagi menentangnya, tetapi memperbolehkan bapak melakukan apa saja, termasuk kekejian yang ditampakkan melalui pembunuhan. Namun kenyataan berdarah yang melahirkan Orde Baru itu selalu mampu ditutupi dengan menegakkan bahasa kosong yang dikemas dalam sepucuk surat sakti bernama Supersemar. Surat yang menjadi sumber kebenaran untuk menyembunyikan politik suksesi penguasa itu memberi jalan bagi siapapun yang berkuasa selanjutnya untuk membiarkan tragedi sejenis tahun 1965-an berlalu, bahkan mungkin dapat berulang, tanpa pertanggungjawaban.

Hingga saat ini, tragedi yang dimanfaatkan untuk menutupi politik suksesi penguasa di tahun 1965-an masih belum terungkap. Meski telah diupayakan berbagai cara untuk mengungkapnya, masih saja ada beragam tantangan yang perlu untuk dihadapi dengan jeli dan waspada. Namun, kembali pada kisah pewayangan tentang politik suksesi penguasa, terselip sebuah cerita dan cita-cita besar yang bertujuan agar politik pergantian kekuasaan tidak semata-mata dikontestasikan secara berlebihan-lebihan. Tetapi hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menegosiasikan kepentingan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam politik suksesi penguasa.

Sastra wayang dengan lakon Prasthanikaparwa yang berkisah tentang lengsernya Yudhistira sebagai Raja Hastina agaknya potensial untuk disadur ulang dalam konteks politik suksesi di masa kini. Artinya, cerita dan cita-cita politik suksesi tokoh Pandawa itu dapat dimanfaatkan sebagai sebuah bahasa bersama (*lingua franca*) dalam dunia politik modern untuk menemukan suatu kesepakatan politik. Sebagai contoh, mendiang Benedict Anderson pernah membuat buku tentang wayang yang berjudul *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (2000/2003/2008). Buku yang terbit pertama kali pada bulan Agustus 1965, tepatnya sebelum G-30-S meletus, dengan judul *Mythology and the Tolerance of the Javanese* itu sempat dikritik oleh sesama koleganya di Amerika sebagai “salah tafsir”, bahkan “salah nujum”. Alasannya, jika orang Jawa benar-benar toleran sebagaimana dipaparkan dalam buku itu, mengapa justru terjadi pembantaian antar sesama orang Jawa?!?

Jawabannya, tentu saja bukan karena orang Jawa tidak lagi toleran, melainkan lantaran ada pihak atau kalangan tertentu yang berupaya membelokkan atau menunda budaya toleran tersebut agar dilupakan oleh orang Jawa. Upaya-upaya itu dimungkinkan oleh dukungan finansial dan peralatan militer yang secara sistematis dan hegemonik membuat daya pengaruh dari dasar dan tradisi seni sastra dan wayang semakin memudar. Hal itulah yang mengakibatkan toleransi menjadi rapuh dan mudah jatuh ke dalam lubang atau jebakan tragedi kekerasan yang tak terlupakan. Maka, bertepatan dengan seabad komunis di negeri ini, suatu tafsiran atau saduran baru dalam kajian ilmu atas peristiwa politik di tahun 1965-1966 yang mampu merekatkan kembali ikatan-ikatan toleransi yang telah dilonggarkan akibat politik suksesi penguasa perlu digaungkan agar tidak lagi jatuh pada lubang atau jebakan tragedi yang serupa.

Putusan *International People's Tribunal* (IPT) kasus 1965 yang menyebut peristiwa 1965 sebagai genosida patut diperhatikan. Hal ini dikarenakan bukan semata-mata berkait dengan masalah hukum, melainkan bahwa ada kejahatan kemanusiaan yang dibiarkan terjadi selama 1965-1966. Kejahatan berupa pembunuhan massal, penahanan, perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual itu dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Bahwa ada surat perintah (baca: Supersemar) yang menginstruksikan pemulihan keamanan dan ketertiban bukan berarti mensahkan berbagai tindakan dalam bentuk kejahatan kemanusiaan di atas.

Dalam konteks ini, mending Benedict Anderson memberi catatan kritis mengenai hal itu dengan kerangka nasionalisme. Artinya, kejahatan yang seakan-akan berlangsung secara spontan itu sesungguhnya merupakan bentuk dari sebuah “malpraktik nasionalisme” (Zen R.S. “Rasa Malu dan Nasionalisme”, *Sumatera Ekspres*, 15/12/2015). Di sini menarik untuk mencermati mengapa dan bagaimana nasionalisme yang hanya merupakan sebuah pembayangan dapat menghasilkan kejahatan yang sedemikian dahsyatnya.

Bagi Anderson (2001), nasionalisme yang bukan merupakan warisan leluhur atau nenek moyang berupa harta kekayaan atau kekuatan pusaka/ilahi tertentu justru terbentuk dari pembayangan tentang hidup kebersamaan. Mereka yang adalah para anggota bangsa terkecil, sekalipun tidak pernah bertemu, kenal, apalagi bertatap muka, memiliki imajinasi dan inspirasi untuk menjadi sebuah komunitas-komunitas terbayang (*imagined communities*) yang dinamai Indonesia misalnya. Hal itu dimungkinkan berkat jasa industri kapitalisme cetak, seperti surat kabar harian, yang memberi saat dan tempat bagi setiap orang untuk berbicara dan berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Pikiran dari orang-orang yang sejalan dan sesuai dengan kepentingan mereka itu menjadi “embrio” dari kebersamaan yang dibayangkan oleh masing-masing orang. Dari situlah lahir bahasa, rasa, bahkan hasrat, untuk rela mengorbankan diri, bukan orang lain, tanpa pamrih demi kepentingan bersama itu. Dari situ pula cinta pada sesama dan tanah air tercipta demi membangun masyarakat yang mandiri dan toleran.

Nasionalisme yang lahir dari pembayangan itu telah mencatat beragam peristiwa atau aksi revolusioner, seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Segenap peristiwa atau aksi antikolonial itu menjadi penanda bahwa nasionalisme yang dibayangkan oleh para pendahulu kita bukanlah, sebagaimana dirumuskan Bung Karno, sebagai nasionalisme “jang menjerang-njerang” atau agresif terutama terhadap bangsanya sendiri. Tetapi, nasionalisme itu justru lahir dari imajinasi atau pembayangan yang rapuh dan ringkih, sehingga perlu dirawat dengan penuh kasih agar tidak mudah koyak dan boyak oleh kepentingan sesaat dan sepihak. Itulah mengapa nasionalisme tidaklah pernah utuh, apalagi selesai. Sebab imajinasi antara satu orang atau suatu tempat dengan orang atau tempat yang lain tidaklah mungkin sama. Jadi, mustahillah untuk membulatkan

nasionalisme dalam kalkulasi 100 atau 1000 persen sekalipun, karena tetap ada selisih/perbedaan entah bermuatan Sosial, Agama, atau Ras tertentu.

Maka, nasionalisme perlu terus-menerus dikerjakan dalam sebuah proyek yang bernilai cinta, tanpa pamrih, dan toleran. Sebisa mungkin tidak ada pihak/komunitas yang merasa terabaikan, bahkan dianggap tidak sesuai lagi bekerja untuk nasionalisme Indonesia. Setiap orang dengan keragaman manusiawi dan kepribadiannya berhak untuk berimajinasi tentang Indonesia yang lebih adil dan damai. Dengan demikian, tidak ada harga mati untuk nasionalisme, apalagi untuk negara-bangsa, NKRI.

Sayangnya, peristiwa 1965 telah membalik arah sejarah nasionalisme ke arah yang berlawanan dengan tujuan akhir masyarakat yang plural dan toleran. Sebenarnya peristiwa yang didahului dengan aksi penculikan para pimpinan puncak militer itu boleh dibilang sebagai sebuah usaha kudeta yang gagal. Meski menurut Presiden Sukarno pada saat itu, hal semacam itu adalah “biasa dalam revolusi” (Shiraishi, 2001). Namun, dalam perjalanannya rute peristiwa itu berubah menjadi pengambilalihan kekuasaan dengan memanfaatkan kudeta yang gagal untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. “Komunis” adalah salah satu lawan politik yang dipandang layak untuk ditamatkan riwayatnya dengan kekerasan yang mengerikan dan tak menyisakan pikiran, apalagi niat, untuk melakukan perlawanan.

Melalui pembunuhan massal yang dilanjutkan dengan pembuangan ke sebuah pulau terpencil, orang-orang yang dikenai cap “komunis” seakan-akan sudah tidak mempunyai hak untuk hidup lagi di bumi pertiwi ini. Baik di Jawa maupun luar Jawa (Aceh, Sumatera Utara, Bali, Flores), mereka di-*wicirna sahana*-kan, “dikirim ke lembah ketiadaan”, agar tiada lagi bekasnya di muka, bahkan perut, bumi ini (Dhakidae, 2001). Inilah yang membuat nasionalisme menjadi sebuah pembayangan terbatas atau sempit lantaran tanpa rasa malu, apalagi ragu, orang dapat mengambil nyawa siapapun yang dianggap berkaitan atau dapat dikait-kaitkan dengan “komunis”. Bahkan di beberapa daerah, seperti di Sumatera Utara, pembunuhan massal tahun 1965 justru dipandang sebagai “kebanggaan, kehebatan, dan juga kesaktian” yang patut diwariskan dan diperankan kembali sebagai sejarah bangsa ini.

Joshua Oppenheimer yang membuat dua film dokumenter tentang pembunuhan massal tahun 1965 di Sumatera Utara, yakni *Jagal/The Act of Killing* (2012) dan *Senyap/The Look of Silence* (2014), menunjukkan betapa masih kebalnya peristiwa genosida 1965 terhadap hukum (*impunity*). Bahkan para “veteran” jagal

1965 itu dengan ringan dapat berkomentar: “Aku kirim mereka semua ke Surga dan mereka harusnya berterimakasih padaku.” (Anderson, 2013). Komentar yang merupakan buah dari “malpraktik nasionalisme” tersebut bukan semata-mata akibat dari ketakutan terhadap “komunis”, melainkan karena rasa aman dan nyaman yang sudah terlanjur dinikmati dengan menjadi pihak/kalangan yang kebal hukum selama rezim militer Orde Baru berkuasa.

Tetapi, penting juga untuk dicatat, bahwa para pembunuh sadis yang masih merasa bangga dengan masa lalunya di tahun 1965 justru mengakui pula merasa terhantui oleh arwah para korbannya. Bahkan ada beberapa di antaranya yang terekam oleh kamera Joshua menjadi tertekan akibat aksi kejamnya tersebut dan kemudian berperilaku sebagai toa (pengeras suara) untuk mengumandangkan adzan dari atas pohon kelapa. Jadi, bukan hanya keluarga/kerabat/kenalan dari korban genosida 1965 yang mengalami trauma, namun para pelakunya pun justru menanggung derita atas masa lalunya yang tak terbayangkan secara manusiawi. Jika demikian, masihkah perlu mempersoalkan “PKI atau bukan PKI” dari aksi genosida 1965 daripada memperhatikan dampaknya sebagai sebuah “malpraktik nasionalisme” yang melenyapkan identitas kita sebagai bangsa yang beradab?

Pernyataan Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo bahwa dirinya dimutasi sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) periode 2015-2017 lantaran telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar atau menonton film “Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI” di penghujung tahun 2017 menarik untuk didalami. Bahkan beliau juga menyatakan bahwa mutasi atau pengantiannya itu sudah diketahui sebelumnya, namun tetap tidak menyurutkan langkahnya tersebut. Penting untuk diketahui bahwa masa pensiunnya tercatat pada akhir Maret 2018, tetapi mutasinya justru terjadi pada akhir tahun 2017.

Pertanyaannya, apa yang membuat “G30S” selalu fenomenal dalam konteks historis di Indonesia? Sejarah siapa yang sesungguhnya direpresentasikan di sana? Dan, yang tak kalah menarik, pelajaran sejarah macam apa yang dapat diambil dari padanya?

Dalam salah satu esainya yang berjudul “Impunity and Reenactment: Reflections on the 1965 Massacre in Indonesia and its Legacy” (*The Asia-Pacific Journal* Vol. 11, Issue 15, No. 4, April 15, 2013), Benedict Anderson menjelaskan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan selama tahun 1965-1966, khususnya di Sumatera

Utara, sesungguhnya adalah cermin dari rekayasa politik pihak-pihak yang sedang berkuasa untuk mengontrol rakyatnya. Rakyat yang selama ini suara dan kepentingannya selalu diabaikan, bahkan dihilangkan dari pikiran, diposisikan sebagai musuh yang berbahaya dan mengancam sesamanya sehingga layak dan perlu untuk diberi pelajaran. Karena itu, melalui kajian atas dua film dokumenter karya Joshua Oppenheimer, yaitu *Jagal (The Act of Killing - 2012)* dan *Senyap (The Look of Silence - 2014)*, ditunjukkan betapa sesama rakyat dapat dan dilegalkan untuk saling membunuh tanpa rasa bersalah agar tidak terulang lagi peristiwa yang sama dan mengurangi jatuhnya korban yang lebih besar.

Hanya masalahnya, pembunuhan itu dikerjakan secara ilegal. Dengan kata lain, tidak ada payung hukum yang menaunginya, bahkan dibiarkan begitu saja tanpa ada yang menggugatinya. Maka tak heran jika para pelaku pembunuhan itu hingga saat ini masih dapat menghirup udara bebas dan merdeka seperti rakyat kebanyakan. Meski ada juga yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan, namun sebagian besar tetap hidup damai dan tenteram, bahkan ada beberapa yang mencalonkan diri dan mampu menduduki jabatan dalam pemerintahan setempat. Itulah mengapa beberapa nama, seperti Anwar Congo yang belum terlalu lama meninggal dunia pada 25 Oktober 2019, masih menjadi sosok yang disegani dan ditakuti, khususnya bagi siapapun yang pernah terkait atau dikait-kaitkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Ketakutan akan PKI akibat peristiwa "G30S" di masa lalu itu agaknya masih tetap diawetkan dengan menjadikannya mirip seperti "hantu". Maka bukan kebetulan jika hingga saat ini ketakutan yang diintensikan melalui sosok "jadi-jadian" itu tidak pernah absen dalam kehidupan sehari-hari demi membuahkan pretensi yang diharapkan. Namun, sosok seperti itu tampaknya hanya "numpang lewat" seperti layaknya sebuah iklan di televisi. Tak ada yang menggagasnya dengan penuh perhatian, bahkan tak jarang diabaikan dengan mencari penampilan lain yang lebih seru dan mengasyikkan. Hanya, patut dicatat dengan jeli dan waspada bahwa ketakutan yang selalu dipertontonkan di depan publik itu adalah bagian dari sejarah bangsa yang kelam dan belum juga terpecahkan sampai saat ini. Ketakutan yang direkayasakan sejak Orde Baru berkuasa itu telah banyak dikaji, namun selalu steril dari eksekusi meski telah ada sejumlah upaya rekonsiliasi. Salah satunya, seperti telah dikerjakan Jess Melvin di Aceh dan dibukukan dengan judul *The Army and The Indonesian Genocide - Mechanics of Mass Murder* (London: Routledge, 2018). Sementara

Pipit Rochijat juga sudah sejak awal memperingatkan, lewat tulisannya yang berjudul "Am I PKI or non-PKI" (*Indonesia* 40, October 1985), bahwa pokok soalnya bukan masalah "PKI atau bukan PKI", tetapi politik ketakutan yang direkayasakan untuk menciptakan ingatan akan PKI, termasuk para preman yang menjadi korban dari "Petrus" (penembak misterius) di tahun 1980-an, secara berlebihan.

Mengapa? Sebab ingatan semacam ini bukan hanya membuat para korbannya menjadi takut, melainkan membuat orang lain untuk ikut-ikutan menjadi takut. Jadi, bukan saja mereka yang mengalami, bahkan menyaksikan, peristiwa 1965-1966 itu yang terdampak, akan tetapi yang sekadar membaca, mendengar, dan menonton dari beragam cerita tentang pembantaian itu menjadi mudah bisu dan kelu. Tak heran jika bagi mereka yang terlibat di dalamnya, entah sebagai korban bahkan pelaku, tidak mudah untuk melupakan apa yang telah terjadi. Bahkan hanya dari bunyi seperti "kreg, kreg, kreg" saja, seseorang yang di tahun 1965-1966 mendengar hal itu dari truk-truk yang mengangkut orang-orang di desanya lantaran dituduh berkaitan dengan PKI, mudah menjadi trauma dan ketakutan sedemikian rupa. Apalagi Usamah yang menulis di Majalah *Horison* (No. 8, Tahun IV, Agustus 1969) dengan judul "Perang dan Kemanusiaan" tetap tidak dapat melupakan apa yang telah dilakukannya meski hanya menjadi pelapor bagi orang-orang yang diduga berhubungan dengan PKI, termasuk kerabat dan tetangganya sendiri.

Jadi, jika "G30S" selalu menjadi semacam "mantra" atau "guna-guna" yang ampuh dan mampu memperdayai masyarakat sampai sekarang, apakah hal itu sama saja dengan Monas (Monumen Nasional) di Jakarta yang hingga kini hanya menjadi kawasan wisata dan olah raga? Dibanding dengan monumen atau patung Pembebasan Irian Barat yang sama-sama berlokasi di Jakarta, Monas, sebagaimana dikaji oleh Benedict Anderson dalam bukunya berjudul *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta: MataBangsa, 2000), tidak lebih dari sekadar kartun "Doyok" yang paling populer di koran Pos Kota pada era Orde Baru. Sebab kartun itu hanya menggiring para pembacanya untuk menjadi "konyol" seperti Doyok yang bertampang "udik", bahkan "norak", namun tidak perlu berbuat sama sekali. Jadi jangan-jangan, "G30S" itu tidak ada bedanya dengan kartun "Doyok"?

Menarik bahwa "G30S" yang sudah lebih dari 50 tahun berlalu masih saja ditampilkan setara dengan sebuah kartun. Padahal kartun semacam itu hanya menjadi hiburan dan menina-bobokan imajinasi yang kritis dan kreatif. Maka, masuk akal jika

banyak orang yang sudah tidak takut lagi pada hal dan masalah "G30S", karena penampakannya bukan lagi menjadi sebuah ancaman atau tekanan, melainkan justru trik dan intrik untuk menyamarkan, bahkan menyembunyikan, apa yang sesungguhnya telah terjadi. Inilah akibat dari pengabaian, bahkan pembelokan beragam masalah, yang ditunjukkan lewat rekayasa politik terhadap "G30S". Mulai dari istilah hingga data dan fakta, sama sekali tidak memperlihatkan stabilitas dalam berpendapat, tetapi justru malah membalikkan punggung terhadap "G30S" yang sudah lebih dari setengah abad menjadi sejarah. Maka, pertanyaan yang segera perlu untuk ditanggapi adalah masih adakah pelajaran sejarah yang dapat dihadirkan untuk menggaungkan bahwa "G30S" bukanlah merupakan jimat atau mantra penolak bala?

Kesimpulan

Bukan kebetulan bahwa Ronggowarsita dinobatkan sebagai pujangga (Jawa) di "Zaman Akhir" atau "Zaman Edan". Zaman yang oleh Benedict Anderson (2000) ditandai sebagai "saat kelam" di mana tak ada lagi "tuntunan", selain "tontonan" yang memperlihatkan jungkir baliknya zaman (*wolak walik ing zaman*). Itulah mengapa beragam karya seni di zaman itu berciri begitu sinis, satiris, bahkan tak jarang parodis.

Kini, setelah hampir dua abad berlalu, berbagai karya seni yang dihasilkan tentu telah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah cirinya yang didominasi oleh aroma selebritas, industrial, dan fenomenal. Maka tak heran jika kebanyakan karya seni berpretensi untuk menjadi populis, bahkan milenial.

Termasuk di masa pandemi Covid-19 ini, karya seni seperti musik juga tak lepas dari hal itu. Karena itulah, lagu-lagu yang diproduksi dari genre musik itu lebih berintensi demi kepentingan massal daripada sekadar individual. Apalagi di bawah kendali dari sejumlah protokol kesehatan saat ini, industri musik yang mampu menjadi viral dan kontroversial adalah strategi "minus malum" (memilih yang lebih sedikit buruknya di antara yang terburuk) yang masih masuk akal untuk dijalankan. Itulah yang sempat dialami oleh penyanyi dangdut perempuan yang viral dengan lagu Corona-nya.

Lagu berjudul "Corona" atau "Comunitas Rondo Merana" yang didendangkan oleh biduan muda Alvi Ananta asal Banyuwangi itu justru diprotes, bahkan di-bully dan disomasi, pada awal Maret 2020 lalu. Alasannya, karena judul dan lirik lagu tersebut dipandang "terlalu dipaksakan" dan "seolah menari di atas penderitaan kaum Tenaga

Kerja Indonesia (TKI)" (<https://m.timesmalang.com/berita/110871/begini-lirik-lagu-corona-biduan-banyuwangi-alvi-ananta-yang-diprotes-tki>).

Boleh jadi judul lagu yang bernada "plesetan" itu memang tampak direkayasa. Namun, bukankah hal itu adalah bagian dari berbahasa yang bukan sekadar karena "latah" (Geertz, 1968), melainkan lantaran "gelisah"? Dalam konteks ini, menarik untuk mengajukan tulisan-tulisan di jalan masuk dan gang-gang pada awal masa pandemi ini sebagai kajian perbandingan. Beragam tulisan seperti "Lockdown atau smackdown", "Corona negatif istri positif", atau "Corona jahat kayak mantan #dirumahaja" menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dan akan menjelang ketika dua bulan lalu negeri ini telah dinyatakan terdampak virus Covid-19. Hanya karena belum jelas apa yang perlu dikerjakan, aksi-aksi reaktif, khususnya dalam bahasa tulisan, itu adalah penampakan dari pengalaman gelisah. Maka bukan kebetulan jika gaya bahasanya senada dengan yang sedang viral dan populer, terutama di laman-laman medsos. Dengan demikian, pesan-pesan yang dibahasakan secara "guyonan" atau "ambyar" itu sesungguhnya menggaungkan beragam rasa, yaitu: "anxious (cemas), trembling (gemetar), unmoored (tanpa pegangan), expectant (menanti-nanti)" (Anderson, 2015).

Berbeda dengan bahasa resmi, semisal dari pemerintah atau raja, bahasa yang gelisah itu tampak steril dari jargon-jargon. Sebab bahasa itu ibarat sapaan agar tidak lupa dan mudah abai terhadap sesama yang ada di samping kiri dan kanan kita. Maka sapaan itu bukan sekadar simbol, tetapi aksi nyata yang mengingatkan agar kita tidak hanya gemar berbahasa "adi-luhung", sementara di sekitar kita sedang dilanda fenomena "adi-linglung". Hal itulah yang telah dikerjakan oleh seniman musik campursari ternama, Didi Kempot. Meski belum genap sebulan, penyanyi dengan julukan "The Godfather of Broken Heart" itu yang sempat menggelar konser amal dari rumah bersama Kompas TV untuk mereka yang terdampak pandemi ini telah berpulang pada Yang Maha Kuasa. Kepulangannya yang serba mendadak di awal bulan Mei 2020 ini tentu membuat banyak pihak merasa kaget dan juga "kagol" (kecewa), termasuk para Sobat Ambyar. Namun, segala karya seninya telah memberi pelajaran bahwa bahasa musik atau lagunya yang menggaungkan spirit "ambyar" justru mampu menggerakkan banyak orang untuk berempati dan berdonasi sejumlah 7,6 milyar (<https://www.google.co.id/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanhits/sebelum->

[meninggal-didi-kempot-kumpulkan-rp-7-6-miliar-untuk-perangi-covid-19-1tM3KbVvVut](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/04/25/225534166/konser-rhoma-irama-musik-amal-dari-rumah-kumpulkan-donasi-rp-771-juta)). Heboh sekali bukan?

Sementara musik amal yang juga diselenggarakan dengan kepentingan serupa sekitar dua minggu sesudahnya, ternyata hanya mampu menggalang donasi sebesar 771 juta saja (<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/hype/read/2020/04/25/225534166/konser-rhoma-irama-musik-amal-dari-rumah-kumpulkan-donasi-rp-771-juta>). Dengan lagu-lagu andalannya seperti "Darah Muda", "Begadang", dan yang terbaru "Virus Corona", konser musik dari rumah itu tampak belum mampu menandingi ke-ambyar-an dari Lord Didi Kempot dan para Sobat Ambyar-nya. Kenyataan ini mirip dengan apa yang pernah dikaji oleh Takashi Shiraishi terhadap aksi kerakyatan di Jawa pada awal abad ke-20. Dalam bukunya yang berjudul *Zaman Bergerak* (1997), Shiraishi menunjukkan bahwa bahasa Ratu Adil justru digerakkan oleh aksi para petani dari desa yang buta huruf, namun merasa takjub dan bangga ketika menghadiri rapat-rapat akbar (vergadeering) serta mendengarkan pidato/ceramah (voordracht). Mereka seperti menemukan dunia baru yang luar biasa dan menggairah saat menyaksikan para pemimpin dari organisasi Sarekat Islam (SI) dapat duduk dan berbicara sejajar dengan para pejabat kolonial Belanda. Kesaksian itu dicatat sebagai pengalaman yang aneh dan tidak lazim serta membuktikan bahwa aksi nyata dari rakyat kecil dapat menghasilkan kuasa-kata yang mengarah pada perwujudan harapan-harapan "milenarian" atau "mesianik". Pada titik itulah gaung dari tulisan-tulisan di spanduk atau konser amal ala Didi Kempot memberi semacam "iluminasi" (Benjamin, 1923/1968) yang menuntut pihak-pihak yang berkuasa, baik umara maupun ulama, untuk segera berjuang menangani pandemi global ini.

Dalam konteks ini, iluminasi dari seni(man) yang saat ini tengah berada di "Zaman Ambyar" menjadi amat penting dan menentukan demi menggaungkan apa yang sedang digelisahkan oleh rakyat di bawah. Hal ini pernah ditegaskan oleh pianis Ananda Sukarlan yang memandang bahwa seni bukan sekadar untuk meramaikan pasar. Tetapi, seni dapat menjadi produk dari pasar asalkan bukan melulu sebagai "karya latar belakang" atau "karya smartphone" belaka. Itu artinya, seni tetap dapat menjadi hiburan, namun mampu bergaung sebagai kunci rahasia kegagalan yang hanya berintensi membuat semua orang senang (*Seward*, 24 dan 28 April 2020). Inilah

sesungguhnya seni(man) yang mampu membaca (kegelisahan) para penonton, pendengar dan pembacanya di “Zaman Ambyar”.

Referensi

- Anderson, Benedict. “Impunity and Reenactment: Reflections on the 1965 Massacre in Indonesia and its Legacy”. *The Asia-Pacific Journal* Vol. 11, Issue 15, No. 4, April 15, 2013.
- Anderson, Benedict. *Di Bawah Tiga Bendera. Anarkisme Global dan Imajinasi Antikolonial* Tangerang: Marjin Kiri, 2015.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities. Komunitas-komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar. 2001
- Anderson, Benedict. *Kuasa-Kata. Jelajah Budaya-budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Anderson, Benedict. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qalam, 2000.
- Benjamin, Walter. *Illuminations. Essay and Reflections*. New York: Schocken Books Inc, 1968.
- Geertz, Hildred. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press, 1983
- Melvin, Jess. *The Army and The Indonesian Genocide - Mechanics of Mass Murder*. London: Routledge, 2018
- Rochijat, Pipit. "Am I PKI or non-PKI" dalam *Indonesia* 40, October, 1985.
- Shiraishi, Saya. *Pahlawan-pahlawan Belia. Keluarga Indonesia dalam Politik*. Jakarta: Nalar, 2001.
- Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak. Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Tangerang: Marjin Kiri, 2023.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA).